BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah merupakan salah satu dampak dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Penggunaan sampah semakin tinggi dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk yang ada di daerah tersebut. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa sampah merupakan hasil dari kegiatan sehari-hari manusia/alam yang berbentuk padat. Sampah mencakup hasil dari kegiatan rumah tangga dan sejenisnya. Sedangkan menurut World Health Organization (WHO) dalam Hidayanti & Ariani, (2022) mengatakan bahwa sampah merupakan sesuatu yang sudah tidak digunakan, tidak disenangi, tidak dipakai atau sesuatu yang berasal dari segala kegiatan manusia yang terjadi karena disengaja. Sedangkan Hertati et al., (2023) mengatakan bahwa sampah merupakan sisa dari tindakan yang dilakukan oleh manusia yang sudah tidak digunakan kembali. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa peningkatan penumpukan sampah di Indonesia terjadi setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) mencatat bahwa Indonesia memproduksi total 38.480.443 ton di tahun 2022 dan mengalami peningkatan menjadi 40.116.885 ton pada tahun 2023. Menurut Sriagustin & Nurazijah, (2022) sampah yang dibiarkan akan menumpuk seiring bertambahnya jumlah penduduk. Penumpukan sampah yang dibiarkan akan mengakibatkan dampak yang serius pada masyarakat.

Dampak dari sampah yang tidak terkelola dengan baik sangat besar dan merugikan. Menurut Suwerda (2016) dalam Wibawa, (2021) mengatakan bahwa sampah yang tidak dikelola dengan baik akan memberikan dampak:

1. Sampah yang tidak dikelola dengan baik merupakan salah satu tempat berkembangbiaknya penyakit. Sampah ini akan menjadi tempat yang subut bagi hidupnya mikroorganisme yang dapat memberikan penyakit bagi manusia serta dapat menjadi sarang tikus, lalat, dan hewan pembawa penyakit lainnya.
2. Sampah yang dibakar dapat mencemari udara sekitar sehingga dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan dapat menyebabkan pemanasan global.
3. Sampah yang dibiarkan membusuk dapat menimbulkan bau yang kurang sedap. Cairan yang dikeluarkan oleh sampah dapat meresap kedalam tanah sehingga berdampak kepada pencemaran sumur, air tanah dan pembuangan sampah ke sungai dapat mencemari air sungai.
4. Pembuangan sampah ke sungai secara terus menerus akan menimbulkan dampak pendangkalan sungai sehingga dapat menyebabkan terjadinya banjir.
5. Pengelolaan sampah organik yang kurang baik dapat menimbulkan gas metana yang memiliki sifat bahaya yang dapat membuat masyarakat sekitar keracunan.

Dari berbagai dampak yang ditimbulkan dari penumpukan sampah maka pengelolaan yang baik perlu diimplementasikan di berbagai daerah di Indonesia. Dilansir dari media online www.sehataqua.co.id (2024) pengelolaan sampah yang bersih dan teratur memberikan kontribusi kesehatan di masyarakat. Dengan lingkungan yang bebas sampah maka dapat mengurangi resiko penularan penyakit,

hal ini dapat menciptakan ruang hidup sehat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah di seluruh Indonesia berlomba-lomba untuk memaksimalkan pengelolaan sampah di daerah mereka, termasuk juga pemerintah Kabupaten Blitar.

Penumpukan sampah di Kabupaten Blitar terjadi peningkatan setiap tahunnya, sehingga membuat pemerintah Kabupaten Blitar terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah. Hal ini dapat lihat juga pada tabel jumlah produktivitas yang diambil dari website Sistem Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) sampah yang ada di Kabupaten Blitar berikut.

Tabel 1. 1 Jumlah Produktivitas Sampah di Kabupaten Blitar

Tahun	Total Produktivitas Perhari (dalam ton)
2021	409.93
2022	409.06
2023	413.67

Sumber: Website Sistem Pengelolaan Sampah Nasional (2024)

Berdasarkan data yang diambil dari website Sistem Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tersebut, menunjukkan adanya peningkatan jumlah produktivitas sampah dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah penumpukan sampah disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan penelitian dari Subu & Bala, (2024) ada beberapa faktor yang menjadi penyebab meningkatnya jumlah produktivitas sampah yaitu perubahan pola konsumsi pada masyarakat. Penggunaan bahan sekali pakai menyebabkan akumulasi sampah meningkat. Masyarakat sekarang ini cenderung memilih produk sekali pakai karena mudah dan efisien namun kurang memperhatikan dampak yang dihasilkan dari pemakaian sampah sekali pakai tersebut. Selain itu kepadatan penduduk juga ikut menjadi penyebab meningkatnya jumlah produktivitas sampah pada suatu daerah. Semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka jumlah limbah yang dihasilkan juga ikut meningkat, hal ini dapat

menyebabkan limbah sampah sulit untuk dikelola. Menurut data Badan Pusat Statistika (BPS), Kabupaten Blitar mengalami kenaikan jumlah penduduk. Adanya kenaikan jumlah penduduk tersebut, jumlah sampah yang diproduksi setiap tahunnya juga ikut mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penduduk juga harus dibarengi peningkatan pengelolaan data sampah yang ada di Kabupaten Blitar. Peningkatan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Blitar dibuktikan dengan data peningkatan penduduk yang diambil dari website Badan Pusat Statistika Kabupaten Blitar sebagai berikut.

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar

Tahun	Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar
2020	1.223.745
2021	1.242.207
2022	1.240.322
2023	1.253.550

Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Blitar (2024)

Peningkatan sampah yang ada di Kabupaten Blitar setiap tahunnya juga mengakibatkan meningkatnya penumpukan sampah yang ada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Menurut data dari SIPSN Kabupaten Blitar memproduksi rata-rata 400 ton setiap harinya, hal ini menjadikan sampah yang ada di TPA tidak dapat terkelola secara maksimal. Dilansir dari media online www.blitarkawentar.jawapos.com mengatakan bahwa dari semua jumlah sampah tersebut tidak semua sampah yang datang bisa diolah dan dipilah oleh petugas TPA. Bahkan TPA tidak bisa mengolah separuh dari total jumlah sampah yang datang

setiap harinya dan sisanya akan dibiarkan dan hanya menumpuk di TPA.Dinas Lingkungan Hidup mencatat bahwa TPA hanya mampu mengelola rata-rata 300 kilogram (kg) setiap harinya, hal ini berbanding jauh apabila dilihat dari total sampah yang dihasilkan disetiap harinya.

Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Blitar membuat pengelolaan sampah melalui bank sampah, yang merupakan salah satu fasilitas pengelolaan sampah dengan menggunakan prinsip 3R *(reduce, reuse, recycle).* Masyarkat yang ingin menyetorkan sampahnya akan mendatangi bank sampah unit yang ada di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar dan menyetorkan sampah yang sudah dipilah dan ditukarkan dengan uang. Bank sampah memiliki fungsi untuk edukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah serta mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah Gema Permana Rahman (2024), sedangkan menurut Rusydi (2024) bank sampah merupakan tempat dimana masyarakat dapat menabung sampah yang telah dipilih sebelumnya yang memiliki nilai ekonomis seperti sampah logam, kertas dan plastik. Bank sampah juga mengelola sampah berdasarkan jenisnya dan langsung dijual ke tempat daur ulang, oleh karena itu dengan adanya bank sampah, sampah yang masuk ke bank sampah tidak dibiarkan menumpuk di TPA. Sehingga sampah yang ada di TPA semakin berkurang. Menurut website resmi Pemerintah Kabupaten Blitar www.blitarkab.go.id secara administratif Kabupaten Blitar terdapat 248 kelurahan dan desa yang terdiri dari 220 desa dan 28 kelurahan. Dengan total unit bank sampah di seluruh daerah di Kabupaten Blitar mencapai 176 bank sampah.

Tabel 1. 3 Data Persebaran Bank Sampah di Kabupaten Blitar

No	Kecamatan	Jumlah Bank Sampah
1.	Kanigoro	36
2.	Talun	22
3.	Wlingi	20
4.	Binangun	13
5.	Udanawu	9
6.	Gandusari	9
7.	Kesamben	9
8.	Ponggok	8
9.	Sutojayan	7
10.	Selopuro	7
11.	Selorejo	6
12.	Sanankulon	4
13.	Doko	4
14.	Wonotirto	4
15.	Kademangan	3
16.	Bakung	3
17.	Panggungrejo	3
18.	Wonodadi	2
19.	Nglegok	2
20.	Garum	2
21.	Wates	2
22.	Srengat	1
	Total	176

Sumber: Website Sistem Informasi Bank Sampah Kabupaten Blitar (2024)

Bank sampah merupakan tempat dimana masyarakat dapat menukar sampah mereka menjadi uang dengan memilih dan memilah sampah mereka sendiri. Sampah yang dapat ditukar pada bank sampah merupakan sampah yang masih bisa didaur ulang seperti kardus, plastik, sisa makanan dan bahan lainnya. Nilai tukar uang yang dihasilkan masyarakat berbeda tiap waktu karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar menyesuaikan harga pasar agar harga tersebut tidak kalah dengan pengepul sampah lainnya. Namun dengan layanan yang berbasis website yang memudahkan masyarakat dalam *tracking* data sampah yang mereka setorkan,

hal ini merupakan kelebihan yang tidak dimiliki oleh pengepul sampah di Kabupaten Blitar

Namun, pengimplementasian bank sampah kurang maksimal. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, implementasi bank sampah menggunakan sistem manual kurang efisien karena banyaknya jumlah bank sampah membuat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar kesulitan dalam pendataan jumlah sampah yang dikelola oleh bank sampah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Zemmy Selaku Staf Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar mengatakan bahwa:

> "Pencatatan menggunakan sistem manual tidak *real time*, untuk pembaruan data bisa memakan waktu 1 sampai 6 bulan, data yang masuk direkap trus baru diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Oleh karena itu data yang direkap seringkali tidak sama dengan data yang sebenarnya ada di lapangan, dan dengan rekapan data yang bertumpuk-tumpuk, seringkali terjadi duplikasi data." (Wawancara Pendahuluan Tanggal 21 November 2024)

Pendataan menggunakan sistem manual juga memiliki keterbatasan informasi kepada publik. Sulitnya masyarakat dalam mengakses informasi pengelolaan membuat pelayanan publik kurang transparan. Ketidak transparanan dalam pengelolaan suatu program memberikan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga masyarakat cenderung meragukan integritas dan kinerja pegawai pemerintah Silaban et al., (2024). Pencatatan dengan sistem manual mengharuskan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar mendatangi unit bank sampah sat persatu untuk melakukan verifikasi data. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar menginginkan sistem pengelolaan bank sampah yang terintegrasi dan mudah diakses oleh publik serta dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Permasalahan yang dialami, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar membuat solusi berupa suatu inovasi pengelolaan sampah berbasis website guna meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien dengan menggunakan pemanfaatan internet bernama SI BANKSAM (Sistem Informasi Bank Sampah). Aplikasi ini merupakan solusi guna mengatasi pengelolaan bank sampah yang ada di Kabupaten Blitar. Aplikasi Sistem Informasi Bank Sampah atau yang disingkat SI BANKSAM ini merupakan sebuah aplikasi yang diasosiasikan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dan dilaksanakan serta dipertanggungjawabkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blitar yang ditujukan untuk memberikan informasi secara real time kepada masyarakat terkait pengelolaan bank sampah yang ada diseluruh wilayah di Kabupaten Blitar. Dengan mudahnya masyarakat dalam mengakses informasi terkait pengelolaan sampah yang ada seluruh wilayah Kabupaten Blitar, pemerintah berharap hal ini dapat mendorong partisipasi masyarakat yang ada di Kabupaten Blitar dalam memilah sampah yang mereka hasilkan.

Aplikasi pengelolaan bank sampah berbasis website ini memiliki kelebihan yaitu sistem pelayanan online yang terintegrasi dan memiliki database digital terpusat sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar memiliki arsip data yang mudah untuk ditelusuri dan memiliki pelayanan 24 jam masyarakat hanya dengan mengakses laman website https://banksampah.blitarkab.go.id/. Selain itu, sistem pelaporan terkait pengelolaan sampah juga real time. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup dapat dengan mudah untuk mengirim data pengelolaan sampah Kabupaten Blitar ke Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).

Pemberlakuan sistem pengelolaan sampah secara digital, pemerintah berharap pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Blitar akan mudah untuk dikendalikan. Adanya sistem yang lebih transparan juga diharapkan dapat meningkatkan peran dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya nasabah bank sampah setiap tahunnya. Dengan adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat ini juga diharapkan dapat mengurangi angka penumpukan sampah yang ada di Kabupaten Blitar.

Tabel 1. 4 Jumlah Nasabah Aplikasi SI BANKSAM

Tahun	Jumlah Nasabah
2022	1501
2023	3012
2024	9991

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar (2024)

Hadirnya SI BANKSAM juga diharapkan dapat menjadi solusi terkait kurang maksimalnya sistem pencatatan data sampah manual yang sering menyebabkan inkonsistensi dan duplikasi terkait data sampah. SI BANKSAM juga meningkatkan transparansi pelayanan publik, dengan hadirnya SI BANKSAM masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pengelolaan bank sampah yang dilakukan oleh pemerintah. SI BANKSAM diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang lebih menarik serta meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya daur ulang dan pengurangan sampah.

Adanya inovasi tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sampah yang berbasis teknologi. Dengan adanya transformasi publik mendorong pemerintah untuk meningkatkan kinerja yang dapat menjawab semua

kebutuhan masyarakat yang lebih berkembang dan tersedianya pelayanan publik yang cepat, mudah serta responsif Hamdillah (2023).

Penelitian sebelumnya oleh Safiri (2022) membuktikan bahwa adanya implementasi dalam inovasi pelayanan publik dapat menyebabkan perubahan pada budaya organisasi dan merubah pola pikir serta dapat mendorong sikap proaktif pegawai pelayanan publik dalam menerima perubahan. Selain itu penelitian dari Taufiqurokhman et al., (2024) membuktikan bahwa transformasi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dapat memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik. Dengan pemanfaatan teknologi ini, terbukti dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik, efektivitas, serta kepuasan masyarakat.

Inovasi juga dijadikan sebagai parameter keberhasilan reformasi birokrasi dalam konteks pelayanan publik. Menurut Mergel 2016 dalam Utami, (2023) inovasi merupakan salah satu solusi guna meningkatkan efisiensi serta kualitas pelayanan publik, dengan adanya inovasi maka akan memberikan dampak positif yaitu:

1. Pengoptimalan proses serta sumberdaya, dengan adanya inovasi akan memudahkan pemerintah dalam mengidentifikasi sumberdaya yang terbatas. Dengan adanya inovasi yang diadopsi dari teknologi maka dapat terhindarkan dari pemborosan sumberdaya serta waktu yang tidak diperlukan sehingga meningkatkan efisiensi.
2. Respon cepat terhadap perubahan, dengan adanya inovasi memungkinkan pelayanan untuk dapat merespon perubahan serta tantangan lebih cepat.

Dengan pemanfaatan sistem teknologi yang fleksibel maka pemerintah dapat menyesuaikan diri lebih mudah akan perubahan dan kebutuhan masyarakat.

3. Peningkatan kualitas pelayanan, dengan memanfaatkan inovasi, pelayanan publik dalam hal akurasi dan kualitasnya akan meningkat. Dengan adanya teknologi maka dapat memungkinkan pemerintah untuk memberikan pelayanan dengan lebih baik lagi.
4. Transparansi dan Akuntabilitas, kecepatan akses informasi kepada masyarakat dapat digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan transparansi sehingga dapat membangun kepercayaan lebih kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.
5. Meningkatnya partisipasi masyarakat, dengan meningkatkan transparansi publik mengenai data-data, maka masyarakat akan lebih tertarik untuk ikut serta dalam berpartisipasi.

Adanya inovasi pelayanan publik juga mendorong pemerintah guna mendukung program *smart city*. Kota Pintar atau *smart city* merupakan program pemerintah guna mengelola pemerintahan daerah melalui pemanfaatan internet guna memaksimalkan peran teknologi informasi di seluruh perkotaan yang ada di Indonesia Izzuddin, (2022). Konsep ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan publik yang ada di Indonesia. Pemanfaatan internet guna mengelola pemerintahan yang ada di setiap daerah di Indonesia, dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, penggunaan internet ini juga dapat meningkatkan tingkat transparansi pelayanan publik. Adanya program berbasis website, masyarakat akan mudah untuk mengakses hasil dari

program yang telah pemerintah jalankan. Hal ini selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Zemmy Selaku Staf Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar :

> "Dengan adanya sistem yang berbasis internet ini, masyarakat juga dapat melihat seberapa jauh pengelolaan bank sampah ini dilakukan. Dengan melihat website bank sampah ini, masyarakat dapat melihat informasi terkait pengelolaan hingga dapat melihat karya apa saya yang sudah dihasilkan dari bank sampah. Sekaligus dapat digunakan dengan ajang promosi karya yang dijual oleh bank sampah. Pengguna bank sampah juga dimudahkan dengan sistem yang dapat mengakses jumlah tabungan nasabah dengan hanya mengakses laman website bank sampah. Kalau dahulu para nasabah harus datang ke unit bank sampah dulu baru bisa lihat data tabungan kita." (Wawancara Pendahuluan Tanggal 21 November 2024)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa efektivitas memiliki arti ada efeknya, mujarab/manjur dan dapat memberikan hasil yang berguna, sedangkan menurut (Wahyuning Tyas, (2024) efektivitas merupakan suatu usaha yang dilakukan guna mencapai sebuah tujuan yang sudah direncanakan. Melihat efektivitas menurut Gibson (2003) dkk (2003) dalam Muzni Hanipah & Aryani, (2022) menjelaskan bahwa untuk melihat suatu efektivitas program maka dapat dilakukan menggunakan lima dimensi. Yang pertama ada produksi, keberhasilan dalam melaksanakan serta menghasilkan jumlah serta mutu kerja yang sesuai dengan masyarakat. Tahap selanjutnya adalah efisiensi, yaitu hasil kerja yang dicapai dengan pertimbangan (ratio) sumber-sumber yang digunakan (waktu, tenaga, dan biaya). Tahap ketiga kepuasan yaitu kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Tahap yang ke empat kemampuan organisasi dalam menanggapi perubahan serta perkembangan tugas. Tahap yang kelima ada perkembangan, merupakan kemajuan kemampuan suatu organisasi dalam mencapai tujuan atau hasil yang ditargetkan.

Tahap pertama, pada dimensi produksi, perubahan prosedur pengelolaan sampah di Kabupaten Blitar yang semula manual menjadi terintegrasi dengan sistem berbasis website berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Inovasi Daerah Kabupaten Blitar.Sistem Informasi Bank Sampah merupakan sistem pengelolaan bank sampah berbasis digital yang dilatar belakangi rumitnya sistem pengelolaan bank sampah yang ada di Kabupaten Blitar. Aplikasi ini dapat langsung mengumpulkan data terkait jumlah sampah yang masuk ke unit bank sampah. Aplikasi ini merupakan jawaban dari tuntutan masyarakat terkait sulitnya informasi terkait lokasi bank sampah serta produk apa saja yang dihasilkan oleh bank sampah. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Zemmy selaku Staf Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar:

> “Pada aplikasi ini, perolehan data yang didapatkan dari unit bank sampah lebih akurat, karena begitu ada sampah yang masuk langsung bisa diinput tanpa direkap terlebih dahulu. Dengan begini penginputan data pengelolaan sampah untuk dikumpulkan ke Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional lebih cepat. Selain itu aplikasi ini juga diharapkan dapat menjadi solusi terkait tuntutan masyarakat terkait pengelolaan sampah yang lebih cepat dan mudah” (Wawancara pendahuluan tanggal 21 November 2024)

Pada Tahap efisiensi, penginputan data terkait bank sampah berubah dari manual menjadi terintegrasi secara sistem. Penginputan data secara manual mengharuskan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar harus mendatangi unit bank sampah satu persatu untuk input data pengelolaan sampah di masing-masing bank sampah. Dengan adanya sistem yang mengintegrasi seluruh bank sampah yang ada, unit bank sampah langsung bisa menginput data terkait

nasabah dan jumlah sampah yang masuk dengan hanya mengisi form di aplikasi tersebut. Dengan begini, pengelolaan sampah diharapkan lebih efisien karena mengurangi operasional pegawai. Efisiensi pada sistem ini juga bisa dilihat dari mudahnya akses masyarakat untuk melihat data pengelolaan sampah. Dengan adanya aplikasi ini pengelolaan data tabungan sampah menjadi cepat dan lebih terorganisir apabila dibandingkan dengan sistem manual sebelumya.

Tahap kepuasan, mitra bank sampah kesulitan dengan pencatatan data yang baru. Mereka lebih terbiasa dengan sistem manual karena mereka menganggap sistem manual lebih praktis. Penggunaan sistem manual hanya menggunakan kertas untuk mencatat jumlah sampah yang masuk dan data tabungan para nasabah. Hal ini diakibatkan karena pengelola bank sampah masih kurang memahami tentang pengoperasian aplikasi ini. Namun pegawai Dinas Lingkungan Hidup tetap memberikan pelatihan kepada pengelola unit bank sampah guna memaksimalkan peran para pengelola unit bank sampah Aplikasi ini juga kurang disambut baik dari masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Bapak Masna Karimah selaku Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar

> "Sebenarnya aplikasi ini memiliki banyak manfaat, dari dokumentasi, pencatatan yang lebih *update* sampai harga masing-masing sampah yang sudah tertera. Namun masih sedikit masyarakat yang tau dan bisa memanfaatkan aplikasi ini." (Sumber: https://blitarkawentar.jawapos.com/kawentaran/ 2274794454/aplikasi-bank-sampah-di-kabupaten-blitar-kurang-diminati-walau-tersebar-di-berbagai-titik-dlh-sebut-alasan-utamanya Diakses 12 Desember 2024)

Tahap adaptasi mengharuskan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar khususnya pengelola aplikasi Sistem Informasi Bank Sampah (SI BANKSAM) untuk bisa mengoperasikan keseluruhan sistem tersebut. Dalam

mengoperasionalkan aplikasi tersebut bukan hanya menjalankannya, namun juga bisa mengatasi segala permasalahan yang ada dalam sistem baru ini, seperti *error* dan lain sebagainya. Pasalnya aplikasi berbasis internet sering menjadi sasaran peretas sehingga data nasabah bisa terancam. Oleh karena itu, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar harus melindungi data nasabah sehingga dapat memberikan rasa aman bagi nasabah.

Tahap terakhir adalah perkembangan aplikasi tersebut. Meskipun aplikasi ini dapat memberikan kemudahan bagi para pegawai, mitra unit bank sampah dan masyarakat. Tetap ada beberapa penyesuaian dari ketiga elemen tersebut untuk bisa sepenuhnya menerima aplikasi ini. Dinas Lingkungan Hidup terus mengupayakan bahwa aplikasi ini dapat diterima oleh semua masyarakat untuk meningkatkan pengelolaan data sampah yang ada di Kabupaten Blitar. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar juga melakukan evaluasi terhadap layanan tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Blitar terus mengupayakan dalam peningkatan pengelolaan sampah melalui inovasi SI BANKSAM ini. Inovasi ini diharapkan dapat menjawab semua ketidak efektivitasan sistem manual serta bertujuan untuk mengintegrasi data bank sampah yang ada dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait bank sampah yang tersedia. Dalam mengetahui seberapa efektif aplikasi tersebut peneliti menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Gibson et al (2003). Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat perubahan sistem pengelolaan bank sampah yang ada di Kabupaten Blitar dari yang semula menggunakan sistem pencatatan manual ke sistem yang

terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Penelitian terkait efektivitas bank sampah mudah ditemui, namun penelitian terkait aplikasi bank sampah masih sulit untuk ditemui, oleh karena itu penelitian ini sekaligus menjadi kebaruan terkait efektivitas sistem aplikasi bank sampah. Untuk melihat seberapa efektif sistem baru yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Efektivitas Sistem Informasi Bank Sampah (SI BANKSAM) di Kabupaten Blitar"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka bisa didapatkan rumusan masalah yaitu "Bagaimana efektivitas sistem informasi bank sampah (SI BANKSAM) di Kabupaten Blitar?".

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas sistem informasi bank sampah di Kabupaten Blitar sehingga terlaksananya pengelolaan bank sampah berbasis sistem informasi bank sampah yang efektif.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis guna menambah pemikiran terhadap perkembangan ilmu serta dapat memberikan pengetahuan terkait Efektivitas Sistem Informasi Bank Sampah di Kabupaten Blitar.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan/dasar dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang masih relevan dengan penelitian terkait.

2. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar

   Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran yang didalamnya dapat dijadikan masukan bagi implementasi aplikasi SI BANKSAM di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar

3. Bagi Masyarakat.

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait efektivitas berbasis sistem informasi bank sampah (SI BANKSAM) di Kabupaten Blitar.

4. Bagi Peneliti

   a. Penelitian ini digunakan sebagai syarat meraih gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

   b. Dapat menambah ilmu dan pengetahuan terkait Efektivitas Sistem Informasi Bank Sampah di Kabupaten Blitar yang dipadukan dengan teori yang dipilih.